UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2533603 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2533676, 2506634 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2503624, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2506553, 2508412 BANDUNG 40132

Bandung, 07 Juni 2010

Nomor : 078/KP/DEK-FISIP/UNIKOM/VI/2010
Lampiran : -
Perihal : Kerja Praktek

Kepada Yth
Direktur Utama RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
Jl. Pasteur No. 38 Bandung

Dengan Hormat.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia *(FISIP UNIKOM), dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk* dapat menerima mahasiswa/I kami berikut ini :

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1.	43308016	Eko Sumaryanto	PUBLIC RELATIONS
2.	43308006	Rinaldi Dwi Nugraha	PUBLIC RELATIONS

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Pengajuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa/I tersebut disesuaikan dengan Kalender Akademik Unikom yaitu dari tanggal 05 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 untuk tanggal pelaksanaannya kami serahkan kepada pihak perusahaan. Perlu Kami Informasikan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, terima kasih.

Hormat Kami,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Prof. Dr. J.M. Papasi
NIP. 4127 70 00 011

Tembusan :

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK
RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG

Jalan Pasteur No. 38 , Bandung 40161
Telepon : (022) 2034953, 2034954 (hunting) Faksimile : (022) 2032216, 2032533
Surat Elektronik : humas@rshs.or.id, perjan_rshs@yahoo.com
SMS hotline : 081220050547

SB 250.000.

Nomor : DM .03. 01 / C./ 02[8829] VI I / 2010 — 7 Juli 2010
Hal : Praktek Kerja Lapangan

Yang terhormat,
Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Politik
Universitas komputer Indonesia
Jl. Dipati Ukur 112 Bandung

Membalas surat Saudara nomor 078/ KP/DEK – FISIP / UNIKOM/ VI/ 2010 , tanggal 7 Juni 2010 perihal tersebut pada pokok surat di atas dengan ini dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menerima mahasiswa Saudara 2 (dua) orang untuk melaksanakan Praktek Kerj Lapangan (PKL) di Sub Bag Humas Patologi Klinik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Tidak mengganggu pelayanan di RSUP Dr. Hasan Sadikin
2. Mematuhi prosedur / ketentuan yang telah ditentukan oleh RSUP Dr. Hasan Sadikin
3. Hasil dari kegiatan digunakan hanya untuk tujuan akademik (tidak dipublikasikan)
4. Menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada RSUP Dr. Hasan Sadikin melalui Bagian Pendidikan & Penelitian yang disetujui oleh Kepala Sub Bag. Humas RSUP Dr. Hasan Sadikin sejumlah 2 (dua) exemplar paling lambat satu bulan setelah selesai pelaksanaan.
5. Bersedia mempresentasikan hasil kegiatan sesuai kebutuhan RSHS, dengan waktu di tentukan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama
6 Kegiatan dilaksanakan tanggal 12 Juli s.d. 6 September 2010.
7. Membawa pas foto 1 (satu) lembar ukuran 2 x 3 (hitam putih / berwarna)
8. Setelah selesai praktek mahasiswa mengisi formolir kepuasan pelanggan sebagai evaluasi Pelayanan RSHS terhadap mahasiswa yang praktek di RSHS

Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sebelum melaksanakan kegiatan, kami harap peserta yang bersangkutan dapat menghubungi Ka. Bag. Pendidikan & Penelitian melalui Ka. Sub.Bag. Pendidikan & Penelitian Keperawatan & Non Medik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung guna penyelesaian administrasi.

Demikian, agar menjadi maklum.

A.n. Direktur Utama
Direktur SDM & Pendidikan

DEPARTEMEN KESEHATAN RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG REPUBLIK INDONESIA

Dr. Agus Hadian Rahim,dr., Sp.OT(K).,M.Epid.,M.HKes

Tembusan :
1. Direktur Utama RSHS (sebagai laporan)
2. Kepala Sub Bag. Humas RSHS
3. Kepala Bagian Pendfidikan dan Penelitian RSHS
4. Kepala Bagian Perbendeharaan & Mobilisasi Dana RSHS

+ praktek juli s/d Agustus 2010

SUBBAGIAN HUMAS & PROTOKOLER
RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG
JL. PASTEUR NO. 38 – BANDUNG

NAMA MEDIA : HU GALA MEDIA
HARI & TANGGAL : SABTU, 7 - AGUSTUS - 2010
HALAMAN : 1
KOLOM : 2
PERIH :

Tak Mampu Bayar Biaya Operasi Caesar

Pedagang Gorengan "Tersandera" di RSHS

HATI siapa yang tidak dilanda panik saat menghadapi orang tercinta dalam keaadan sakit parah. Apalagi, yang orang yang dicintai itu akan melahirkan buah cintanya. Tetapi siapa nyana, jika buntut dari kepanikan bukan hanya melahirkan sang jabang bayi, melainkan permasalahan administrasi.

Begitulah yang terjadi pada pasangan Ny. Atikah (32) dan Ecep Sudrajat (34). Ketiadaan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) maupun Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) membuat Ny. warga Kp. Panundaan, RT 02/RW 13, Kel. Panundaan, Kec. Ciwidey, Kab. Bandung itu tidak bisa keluar dari Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Ny. Atikah yang bekerja sebagai pedagang makanan kecil/gorengan keliling dan hingga kini masih menjadi pasien rawat inap usai melahirkan anak ketiga dengan operasi *caesar*, diharuskan membayar biaya perawatan sebesar Rp 8.413.930.

Menurut Ecep Sudrajat ditemani adik kandungnya, Rusli (27) di ruang tunggu RSHS, Jumat (6/8), Atikah masuk RSHS, Minggu (2/8). Atikah dirujuk bidan desa karena didiagnosis keracunan akibat penyakit darah tinggi.

"Semula dirujuk ke Rumah Sakit Soreang, tapi karena hari Minggu, katanya tidak ada dokter kandungan. Begitu pula ketika dibawa ke Rumah Sakit Astanaanyar, dokternya juga enggak ada. Jadi karena sudah mendesak, maka bidan desa meminta kami untuk membawa istri saya ke RSHS," urainya

Di tengah kekalutan tersebut, Ecep mengaku tidak membawa keterangan apa-apa saat memasukkan istrinya ke RSHS. Bahkan, ia sendiri mengaku sempat tidak sadarkan diri alias pingsan. saat mendengar istrinya harus dioperasi *caesar* guna menyelamatkan jiwa istri dan anak yang ada dalam kandungannya.

"Semua keluarga kaget, jadi kita *nurutin* semua yang diminta oleh dokter. Lagi pula saat itu kita tidak ditanya oleh bidan jaga atau petugas lainnya harus membawa surat keterangan tidak mampu. Yang ada dalam pikiran keluarga adalah bagaimana caranya selamat," imbuh Rusli.

Meski operasi berjalan lancar dan Atikah akhirnya selamat dengan melahirkan anak ketiganya yang berjenis kelamin lelaki dengan berat badan 4,5 kg, menurut Ecep dalam proses pembayarannya tidak lancar. Sebab dengan mengandalkan biaya dari pekerjaannya sebagai buruh tani, Ecep mengaku merasa tidak sanggup membayar penuh seperti yang diminta oleh pihak RSHS.

Ia merasa tidak mengerti jika sebelum masuk ke RSHS harus membawa beragam surat keterangan. Baik itu Jamkesnas ataupun Gakinda. "Kita pernah datang ke loket 8, tapi ditolak karena kita hanya menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW/kelurahan/camat. Alasannya, karena terlebih dulu harus mempunyai kartu baik Jamkesmas atau Gakinda," urainya.

Padahal, tambah Rusli, pihak keluarga sudah berupaya untuk mengecek ke kelurahan dan kecamatan. Namun memang dalam daftar baik di Jamkesmas maupun Gakinda tidak ada keluarga Ny. Atikah. "Itu pun langsung dibuatkan. Tapi katanya untuk Jamkesmas 2010 yang tentunya kartu baru akan keluar di 2011," ucap Rusli.

Makin hari makin berat

Saat ini, menurut Ecep, ia hanya menginginkan istri dan anaknya bisa keluar dari RSHS terlebih dahulu. Sebab, dengan masih dirawat inap mengutip perkataan suster maka akan menambah jumlah pembiayaan.

"Saya bukannya ingin lepas tanggung jawab. Tapi membayar Rp 8 juta terus terang saya tidak sanggup. Saya hanya punya Rp 3 juta. itu pun setelah nyari sana sini. Saya hanya minta kebijaksanaan dari rumah sakit saja," urainya.

Kondisi serba kekurangan, menurut Rusli, bukan merupakan akal-akalan pihak keluarganya. Sebab, anak pertama pasangan Ecep dan Atikah yakni Titin (13), harus puas mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah dasar (SD). Sementara anak keduanya yakni Rusmawan masih duduk di bangku kelas tiga SD.

Membantah

Direktur Medik RSHS, dr. Rudi Kurniadi, membantah telah menahan-nahan pasien. Seharusnya pasien melengkapi dulu persyaratan administrasi. Apalagi sebelumnya, suami Ny. Atikah telah menandatangani surat pernyataan sanggup membayar pembiayaan secara umum tidak melalui Jamkesmas dan Gakinda.

"Kalau tidak sanggup bayar, seharusnya datang keluarganya menghadap apakah tidak bisa membayar atau lainnya. Bukan berbicara pada wartawan," ungkap Rudi kepada wartawan.

Suami Ny. Atikah, disarankan untuk menghadap Ketua Tim kesmas/Unit Pengaduan Masy RSHS, dr. Heda untuk mem mengatasi permasalahan ter Selain itu, ia meminta kepada untuk lebih menyosialisasikan genai Jamkesmas ataupun Ga "Pada intinya kita siap memb Untuk apa kita menahan pasie sihan masyarakat yang lainny ingin berobat di RSHS," tamb

(rinny rosliany/ "GM")**

Ka. Subbag Humas & Protokoler
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

Dra. Mimin Sumilawati, MAP
NIP 195605171979102001

SUBBAGIAN HUMAS & PROTOKOLER
RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG
JL. PASTEUR NO. 38 – BANDUNG

NAMA MEDIA : PIKIRAN RAKYAT
HARI & TANGGAL : SENIN, 9 AGUSTUS 2010
HALAMAN : 20
KOLOM : 3
PERIHAL :

Anggaran Kesehatan bagi Pemegang SKTM Harus Tetap Ada

SOREANG, (PR).-
Pemerintah Kab Bandung harus tetap mengalokasikan anggaran pelayanan kesehatan untuk warga miskin yang hanya berbekal surat keterangan tidak mampu (SKTM), selain anggaran untuk program Keluarga Miskin Daerah (Gakinda). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bandung juga berniat mengalihkan penanganan Gakinda kepada perusahaan asuransi kesehatan, agar pengelolaan program tersebut lebih baik.

"Anggaran untuk warga yang hanya memiliki SKTM harus tetap ada. Kesehatan merupakan hak dasar warga negara, layaknya hak memperoleh pendidikan," kata Ketua Komisi D DPRD Kab. Bandung, H. Arifin Sobari, didampingi Wakil Ketua Komisi D, Afendi, di ruang kerjanya, Jumat (6/8).

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan warga miskin setiap hari mendatangi Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Bandung, di Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung di Soreang. Warga mempertanyakan kenapa nama mereka tidak masuk dalam basis data kepesertaan program Gakinda. Karena tidak masuk ke dalam basis data, pada saat mereka atau keluarga mereka yang sakit perlu perawatan ditolak pihak rumah sakit.

Lebih jauh Arifin mengatakan, Pemkab Bandung perlu mencontoh kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengalokasikan dana Rp 2 miliar kepada Rumah Sakit Umum (RSUD) Al Ihsan Baleendah untuk keperluan pelayanan kesehatan bagi warga miskin yang hanya memiliki SKTM.

"Bisa saja Pemkab Bandung menganggarkan dana kesehatan untuk SKTM di RSUD Ebah, RSUD Soreang, ataupun RSUD Cicalengka. Jadi, warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi tidak masuk program Gakinda, bisa tetap dilayani tentunya dengan persyaratan tertentu," ucapnya.

Dikelola pihak ketiga

Sementara untuk mempermudah pelayanan kesehatan warga pemilik kartu Gakinda, menurut Afendi, lebih baik diserahkan kepada pihak ketiga yaitu perusahaan asuransi. "Selama ini Pemkab Bandung juga harus mengurus klaim-klaim perawatan Gakinda, sehingga tenaganya terkuras. Apabila pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga, pemkab bisa lebih fokus kepada upaya pendataan warga miskin dan alokasi anggaran bagi Gakinda," katanya.

Apalagi, pembayaran Gakinda kepada rumah-rumah sakit mitra Pemkab Bandung selalu terlambat, sehingga berdampak kepada citra pemerintah. "Kasihan pihak rumah sakit yang harus terganggu operasionalnya karena biaya pelayanan kesehatan pasien Gakinda belum dibayar," katanya.

Hingga saat ini di Jawa Barat, baru Pemkab Bogor yang menyerahkan pengelolaan Gakinda atau Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) kepada PT Askes. "Penyerahan pengelolaan kepada perusahaan asuransi juga akan memperluas jangkauan pelayanan. Sekarang ini bisa jadi ada warga miskin dari Kab. Bandung yang mengalami musibah ketika bepergian keluar kota, sehingga kartu Gakindanya tidak berlaku untuk memperoleh perawatan di rumah-rumah sakit yang belum bekerja sama dengan Pemkab Bandung," katanya. **(A-71)*****

Ka. Subbag Humas & Protokoler
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

Dra. Mimin Sumilawati, MAP
NIP 195605171979102001

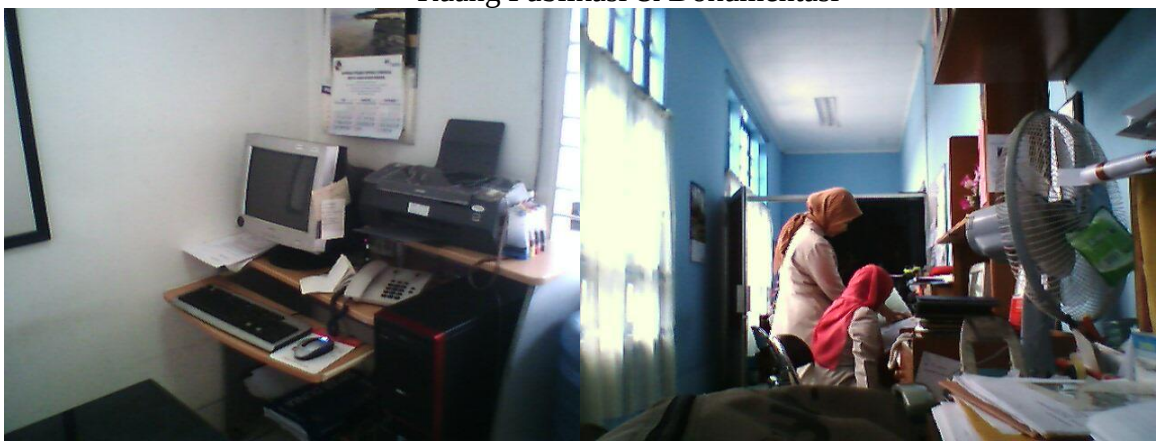
DOKUMENTASI - DOKUMENTASI

1. Ruang-ruang Tempat Penulis Melakukan PKL

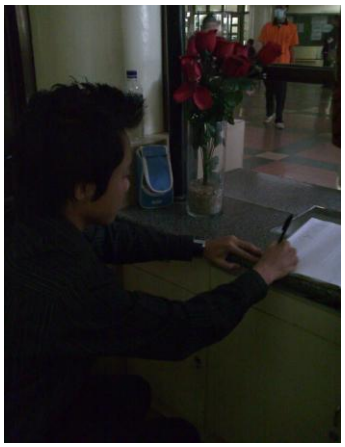
- Ruang Koordiantor Humas & Protokoler

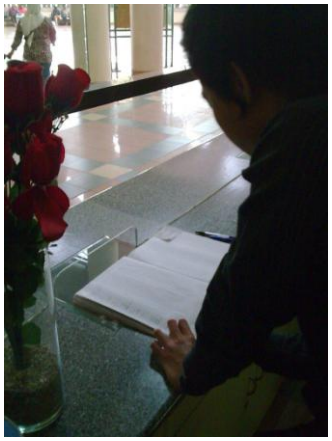


- Ruang Publikasi & Dokumentasi



- Ruang Pelayanan Informasi IGD





2. Acara Ulang Tahun Ikatan Motor RSHS yang ke-1

Acara Pembukaan dengan Upacar Adat



Acara Bazar



Pemberian Hadiah kepada anak yang ikut Sunatan Masal



(Sumber : Arsip Dokumentasi RSUP Dr. Hasan Sadikin dari bagian Humas Tahun 2010)